



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS (LPT) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Karanganyar – Jatipuro km 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar

Kode pos : 57716

Telp. (0271) 495141 Fax. 494705

Website : www.dishub.karanganyarkab.go.id

E-mail : dishub@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang disusun untuk mempersiapkan program-program kerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP.196902151990011002

DAFTAR ISI



Cover

Kata Pengantar----- i

Daftar Isi----- ii

Daftar Tabel----- iv

Daftar Gambar ----- v

BAB 1 P E N D A H U L U A N----- 1

 A. Latar Belakang ----- 1

 B. Dasar Hukum----- 1

 C. Maksud, Tujuan----- 4

BAB 2 DESKRIPSI UNIT KERJA ----- 5

 A. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan ----- 5

 1. Tugas Pokok----- 5

 2. Fungsi----- 5

 3. Struktur Organisasi----- 6

 B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan
 Oleh Skpd/Opd ----- 8

 C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SKPD/OPD -- 8

 D. PERDA/PERBUP Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
 Program Dan Kegiatan ----- 8

 E. Struktur Organisasi----- 10

 F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan ----- 10

**BAB 3 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH ----- 15**

 A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 15

 B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 15

**BAB 4 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ----- 18**

 A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 18

B.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	25
C.	Pelaksanaan Urusan Pilihan-----	30
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan -----	30
BAB 5	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN-----	31
A.	Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten -----	31
B.	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten-----	31
C.	Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa-----	32
BAB 6	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL-----	33
A.	Bidang Urusan Pendidikan-----	33
B.	Bidang Urusan Kesehatan -----	33
C.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum-----	33
D.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat-----	33
E.	Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	33
F.	Bidang Urusan Sosial -----	33
BAB 7	INOVASI DAN PENGHARGAAN -----	34
A.	Inovasi dan Penghargaan -----	34
BAB 8	PENUTUP-----	35
A.	Kesimpulan-----	35
B.	Saran -----	35

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Daftar SOP Dinas Perhubungan-----	8
Tabel 2.2	Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan -----	8
Tabel 2.3	Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2023-----	11
Tabel 2.4	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi -----	14
Tabel 2.5	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi-----	14
Tabel 2.6	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)-----	14
Tabel 2.7	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)-----	15

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan-----	10
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi tugas di Bidang Sarana dan Keselamatan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan , maka dibentuklah Sekretariat Dinas Perhubungan untuk mengkoordinir Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut dijabarkan dalam program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran selanjutnya dilaporkan sebagai dasar evaluasi dan untuk menilai kinerja SKPD. Pelaksanaan program kerja dimaksud meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Demikian pula dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang melayani masyarakat di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta Bidang Sarana dan Keselamatan sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan hal yang harus terus menerus diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun pelaporan mengenai pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan dinas teknis yang mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan. Dalam rangka mewujudkan Kota Kabupaten Karanganyar yang bersih dan indah serta kualitas lingkungan yang baik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka dari itu dibentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945

3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - j. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - k. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
 - l. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- q. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- t. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- u. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- v. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- w. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dan merupakan pertanggung jawaban kepada Bupati.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini adalah sbb :

1. Melaporkan langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2023; dan
2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan sasaran dari Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini yaitu :

1. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur transportasi perhubungan dan LLAJ;
2. Tersedianya aksesibilitas transportasi untuk intern dan antar wilayah desa dan kota di Kabupaten Karanganyar;
3. Tercapainya kelancaran lalu lintas dan berkurangnya kecelakaan di sektor transportasi darat;

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenang daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumuskan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. Pelaksana kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dishub; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural yang ada di dalamnya, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dijabarkan lebih lanjut secara lebih terperinci dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub. Bag. umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengujian Sarana; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

- a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- b. Sekretaris.

Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, hokum, keuangan, asset, kerumahtanggaan,kerjasama, kerasipan, dokumen,keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

- 1) Kepala Sub Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauaan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan hokum, kehumasan ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dishub.

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Kepala Bidang Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pada bidang lalu lintas dan angkutan.

1) Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b) Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
- c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- d) Menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
- e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

2) Kepala Seksi Pengujian Sarana

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
- c) Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

1) Kepala Seksi Prasarana

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- b) Melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
- c) Melaksanakan pengelolaan parkir; dan
- d) Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

2) Kepala Seksi Keselamatan

Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
- b) Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;

- c) Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
- d) Melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui seksi/ Subbagian dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh SKPD/OPD

NIHIL

C. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD

Tabel 2.1 Daftar SOP Dinas Perhubungan

NO	NAMA SOP	STATUS
1	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Periodik	Aktif
2	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama	Aktif
3	SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Aktif
4	SOP Pelayanan Parkir	Aktif
5	SOP Penyelenggaraan Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal	Aktif
6	SOP Pembuatan Rekomendasi Perizinan Angkutan	Aktif
7	SOP Perijinan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas	Aktif

D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2 Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

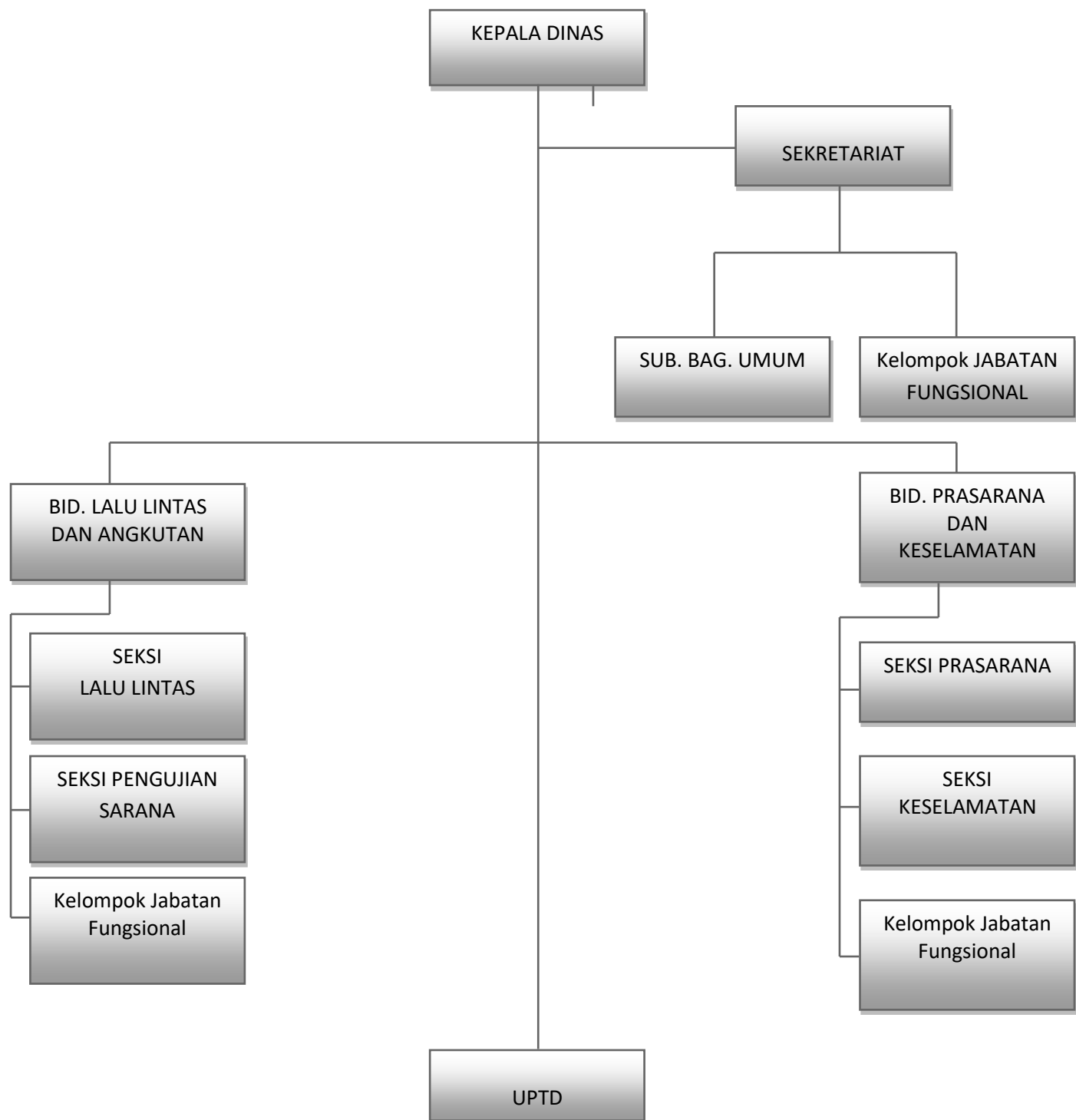
NO	JENIS	NOMOR	TANGGAL TERBIT	TENTANG	STATUS
1.	PERDA	6/2012	27 Juni 2012	Retribusi Perizinan Tertentu	Aktif
2.	PERBUP	38/2012	3 Juli 2012	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
3.	PERDA	4/2015	23 September 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
4.	PERBUP	122/2016	13 Desember 2016	Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Aktif
5.	PERDA	17/2016	2 Nopember 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Aktif

6.	PERDA	7/2017	31 Maret 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
7.	PERBUP	1/2017	17 Maret 2017	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	Aktif
8.	PERDA	20/2019	17 Desember 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif

E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Dasar Hukum : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS, CPNS, dan Tenaga Harian Lepas, yang dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian adalah :

1. PNS : 53 Orang

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

- a. PNS Golongan I : 3 Orang
- b. PNS Golongan II : 20 Orang
- c. PNS Golongan III : 25 Orang
- d. PNS Golongan IV : 5 Orang

2. Tenaga Harian Lepas / Non PNS : 119 Orang

Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Fungsinya yaitu :

- a. Sekretariat : 17 Orang
- b. Bidang LLA : 49 Orang
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan : 53 Orang

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas : SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
 - a. Sekretaris : AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M.
 - b. Kasubbag Umum : TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.
 - a. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan : BAMBANG PRASETYO, S.H.
 - b. Kasi Pengujian Sarana : HARIYANTO, A.Md.
 - c. Kasi Lalu Lintas : MULADI, S.E.
- 2. Kabid Prasarana dan Keselamatan : TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M..
 - a. Kasi Prasarana : MARYANI, S.H.
 - b. Kasi Keselamatan : DWI SETYO PURNOMO, S.E.

Tabel 2.3. Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2023

N O	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAW AIAN	PANGKAT/GOLO NGAN
			(PNS / CPNS)	
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	196902151990011000	PNS	IV/c
2	AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M.	19710816199403 1 007	PNS	IV/b
3	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	196612011986031000	PNS	IV/a
4	BAMBANG PRASETYO, S.H.	196604111985102000	PNS	IV/a

5	DWI TJAHJO ARINTO, S.E., M.M.	19720115200604 1005	PNS	IV/a
6	TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.	19700705199201 2001	PNS	III/d
7	MARYANI, S.H.	19670301198903 1000	PNS	III/d
8	MULADI, S.E.	19670628199203 1000	PNS	III/d
9	DWI SETYO PURNOMO, S.E.	19811003201001 1000	PNS	III/d
10	HARIYANTO, A.Md.	19810607200801 1000	PNS	III/c
11	ITA SARI RATNAWATI, S.Si., M.M.	19820117201001 2019	PNS	III/d
12	AGUNG WIDODO, S.Si.T.	19810727200312 1001	PNS	III/d
13	WISIK PRASTINI, S.Sos.	19770524199803 2002	PNS	III/d
14	HENI IKAWATI, S.E.	19860708201003 2003	PNS	III/d
15	ENDRI DWI LESTARI, S.E.	19800825200801 2022	PNS	III/c
16	SRI SAPARNI, S.E.	19680503200701 2048	PNS	III/b
17	YULIASTINI PONCOWATI, S.E.	19790706200902 2005	PNS	III/b
18	HERLIN ROSITA, A.Md.	19820929200801 2005	PNS	III/b
19	AIDU HUFRON, S.T.	19890203201101 1001	PNS	III/b
20	AZIZ APRIYANTO, S.T.	19870415201101 1011	PNS	III/b
21	CORY DYAH FITRIANA, S.S.T (TD)	19940313201903 2023	PNS	III/b
22	CITRA MEGA PUSPITA, A.Md.	19881113201101 2006	PNS	III/b
23	MEILINDA FATMA, S.St.TD	19960524201903 2011	PNS	III/b
24	ARIZAL FATONI, S.Kom.	19910208202012 1006	PNS	III/a
25	TRI PURNAMASARI, S.M.	19880907201101 2013	PNS	III/a
26	RIANI, S.Kom.	19850511201101 2021	PNS	III/a
27	ENDRO WAHONO	19750608200701 1013	PNS	III/a
28	DEHAN SUHARTONO, ST	19811216201001 1002	PNS	III/a
29	GIYANTO	19821221201001 1003	PNS	III/a
30	PRIJONO	19720321200701 1012	PNS	III/a
31	SUPARTI, S.A.P.	19821206201001 2001	PNS	II/d
32	SADIMIN	19710825201001 1002	PNS	II/d

33	AGUS PURNOMO	198404142010011004	PNS	II/d
34	YOYOK SARTONO, S.A.P.	198004122010011003	PNS	II/d
35	KUKUH PRAKUSO	197909222010011001	PNS	II/d
36	SUGIYATMAKA	196811052009021001	PNS	II/d
37	NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB	199410292019032014	PNS	II/d
38	YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB.	199606102019032009	PNS	II/d
39	SUJIMAN	198003052010011004	PNS	II/d
40	JOKO PRIYONO	198304282010011004	PNS	II/d
41	AGUS JATMIKO	196808162007011034	PNS	II/c
42	BERDI ARITONANG, A.Ma.	198709122019031008	PNS	II/c
43	WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB.	199105272019031009	PNS	II/c
44	KRIS WAHYU TRIATMOJO	197603122012121001	PNS	II/c
45	AGUS TURNADI	198608162012121002	PNS	II/b
46	SULARDI	197312062009021001	PNS	II/b
47	SUPARNO	196603062010011001	PNS	II/b
48	MULAT WAHYONO	197909212012121002	PNS	II/a
49	SUYADI	197512122012121003	PNS	II/a
50	SUKEMI	196706191998031005	PNS	II/a
51	SUGIYONO	197302152012121001	PNS	I/c
52	GIYANTO	197012082012121001	PNS	I/c
53	WAGINO	196902212012121001	PNS	I/c

Tabel 2.4 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
2	AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
3	BAMBANG PRASETYO, S.H.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
4	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
5	TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
6	MULADI, S.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
7	HARIYANTO, A.Md.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
8	MARYANI, S.H.	Kepala Seksi Prasarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
9	DWI SETYO PURNOMO, S.E.	Kepala Seksi Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi

Tabel 2.5 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

Tabel 2.6 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	DWI TJAHJO ARINTO, S.E.	197201152006041000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN
2	ITA SARI RATNAWATI, S.Si., M.M.	198201172010012000	PERENCANA AHLI MUDA PERENCANA
3	AIDU HUFRON, A.Ma.	198902032011011000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA

4	AZIZ APRIYANTO, A.Ma.	198704152011011000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA
5	BERDI ARITONANG, A.Ma.	198709122019031000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
6	CITRA MEGA PUSPITA, A.Md.	198811132011012000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA
7	NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB	199410292019032000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
8	RIANI, A.Md.	198505112011012000	PRANATA KOMPUTER
9	WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB.	199105272019031000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
10	YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB.	199606102019032000	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL

Tabel 2.7 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Perhubungan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0,44 persen Ket.:	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
				- IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) - IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan kabupaten)	67,00 Ket. :
				Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek	

			AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih
--	--	--	--

				rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (kurang dari 3 dalam seminggu), bobot = 0,5	
2	2.	0,00 Ket.:	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,44 Ket. :

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 70.456.000,00 Realisasi: Rp. 69.820.000,00 Persentase: (99,10%)	tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.902.800,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen (100.00%)		

			A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase: (96,76%)	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 dokumen			
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.982.600,00 Persentase: (99,42%)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.973.000,00 Persentase: (99,10%)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.905.200,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen (100.00%)		

				Persentase: (96,84%)	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dokumen			
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 149.995.800,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 5 dokumen	5 dokumen (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Mebel Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	erpenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebeleur 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	15 unit (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 22.890.000,00 Realisasi: Rp. 22.803.000,00 Persentase: (99,62%)	Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 unit			
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 49.820.000,00 Persentase: (99,64%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit	2 unit (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen	12 dokumen (100.00%)		
				2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 307.896.960,00 Realisasi:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	168 orang (100.00%)		

				Rp. 307.896.960,00 Persentase: (100,00%)	Pelatihan 168 orang			
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 2.994.025.400,00 Realisasi: Rp. 2.357.628.200,00 Persentase: (78,74%)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit	1 unit (100.00%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 100.014.000,00 Realisasi: Rp. 99.750.800,00 Persentase: (99,74%)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket	1 paket (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 170.000.000,00	terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai	1 paket (100.00%)		

			DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi: Rp. 167.670.000,00 Persentase: (98,63%)	dan layak digunakan 1 paket			
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 5.750.000,00 Realisasi: Rp. 5.520.000,00 Persentase: (96,00%)	terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan p erundang- undangan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 32.840.000,00 Realisasi: Rp. 32.840.000,00 Persentase: (100,00%)	terpenuhinya kebutuhan alat tuliskan kantor pendukung operasional kantor 90 jenis	90 jenis (100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran:	tersediannya barang cetak, foto copy dan	12 bulan (100.00%)		

				Rp. 15.084.600,00 Realisasi: Rp. 15.066.600,00 Persentase: (99,88%)	penjilidan 12 bulan			
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 5.811.936.748,00 Realisasi: Rp. 5.400.905.926,00 Persentase: (92,93%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 orang	61 orang (100.00%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 152.500.000,00 Realisasi: Rp. 144.870.984,00 Persentase: (95,00%)	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 bulan (100.00%)		

				Rp. 45.000.000,00 Realisasi: Rp. 44.988.500,00 Persentase: (99,97%)	Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan			
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 176.366.000,00 Realisasi: Rp. 174.781.674,00 Persentase: (99,10%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 unit	12 unit (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 11.400.000,00 Realisasi: Rp. 10.729.700,00 Persentase: (94,12%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 unit	20 unit (100.00%)		
			m PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 20.000.000,00	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service	12 bulan (100.00%)		

			DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi: Rp. 19.670.000,00 Persentase: (98,35%)	peralatan kerja 12 bulan			
				2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 55.467.040,00 Realisasi: Rp. 55.247.500,00 Persentase: (99,60%)	Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 142.722.500,00 Realisasi:	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan (100.00%)		

				Rp. 118.575.200,00 Persentase: (83,08%)	SKPD terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan			
			o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 39.741.200,00 Persentase: (99,35%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
			p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.882.600,00 Persentase: (97,65%)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERHUBUNGAN		a. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.999.912,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 325.360.000,00 Realisasi: Rp. 325.356.800,00 Persentase: (100,00%)	Tenaga administrasi 10 orang, Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan 12 Bulan	10 orang, 12 Bulan (100.00%)		
			b. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU	1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	jumlah pelaksanaan patroli	50 kegiatan, 12 kegiatan		

			LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Angkutan Umum Anggaran: Rp. 209.200.000,00 Realisasi: Rp. 191.214.600,00 Persentase: (91,40%)	pengawasan lalu lintas 50 kegiatan, jumlah pelaksanaan operasi gabungan dengan polres 12 kegiatan	(100.00%)		
			c. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 300.000.000,00 Realisasi: Rp. 299.025.600,00 Persentase: (99,68%)	terpenuhinya perawatan dan perbaikan alat uji serta kalibrasi 12 Unit, Jumlah Tenaga Administrasi Kegiatan 5 orang, terlaksananya perbaikan gedung pengujian 1 unit	12 Unit, 5 orang, 1 unit (100.00%)		
			d. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupat	1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 521.450.000,00 Realisasi: Rp. 499.047.200,00 Persentase: (95,70%)	Tenaga pelaksanaan pengamanan lalu lintas 12 orang, jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten karanganyar 150 kegiatan	12 orang, 150 kegiatan (100.00%)		

			en/Kota					
			e. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.521.000,00 Persentase: (55,21%)	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin 10 kegiatan	10 kegiatan (100.00%)		
			f. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Anggaran: Rp. 965.720.000,00 Realisasi: Rp. 958.849.100,00 Persentase: (99,29%)	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 12 bulan, Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh Pekab 1 lokasi, jumlah tenaga administrasi 34 orang	12 bulan, 1 lokasi, 34 orang (100.00%)		
			g. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU	1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	jumlah jaringan trayek angkutan 14 Buah, tenaga	14 Buah, 2 orang (100.00%)		

			LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 67.680.000,00 Realisasi: Rp. 60.109.000,00 Persentase: (88,81%)	administrasi pelayanan angkutan 2 orang			
			h. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 98.067.800,00 Persentase: (98,07%)	jumlah aplikasi perhubungan 1 Buah, Tenaga Administrasi 2 orang	1 Buah, 2 orang (100.00%)		
			i. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan	1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 227.000.000,00	Jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran 11 Unit	0 Unit (0.00%)		

			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi: Rp. 207.429.399,00 Persentase: (91,38%)				
		j.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 126.156.000,00 Realisasi: Rp. 125.000.000,00 Persentase: (99,08%)	jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		k.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 285.875.000,00 Realisasi: Rp. 279.511.515,00 Persentase: (97,77%)	terpenuhinya lampu penerangan jalan umum dan high mast di jalan- jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan; jumlah CCTV di	1 Paket (100.00%)		

					setiap samping APILL; Pemasangan rambu lalu lintas; pemasangan marka jalan; pemasangan guardrail 1 Paket			
			I. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 280.000.000,00 Realisasi: Rp. 277.293.100,00 Persentase: (99,03%)	jumlah aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan 1 aplikasi, Jumlah Tenaga Penguji Kendaraan 6 orang, jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian 12 bulan	1 aplikasi, 6 orang, 12 bulan (100.00%)		
			m PROGRAM P . ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Anggaran: Rp. 113.800.000,00 Realisasi: Rp. 110.440.000,00 Persentase: (97,05%)	Jumlah Tenaga Kegiatan 4 orang, jumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan yang terpelihara dengan baik 12 bulan	4 orang, 12 bulan (100.00%)		

				2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Anggaran: Rp. 906.502.500,00 Realisasi: Rp. 892.157.300,00 Persentase: (98,42%)	Jumlah Tenaga Kegiatan 11 orang, terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di kabupaten karanganyar; terpenuhinya pemeliharaan APILL di kabupaten karanganyar 12 bulan	11 orang, 12 bulan (100.00%)		
--	--	--	--	--	---	------------------------------	--	--

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN*Nihil*

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

Terdiri dari tugas yang diterima dan Tugas Pembantuan yang di berikan

A. Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

1. Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.
2. Realisasi
- Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

3. Permasalahan
4. Saran dan Tindak Lanjut

B. Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.
2. Realisasi
- Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

C. Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa.

Tabel V.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada Desa

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Pendidikan	<i>NIHIL</i>
B. Bidang Urusan Kesehatan	<i>NIHIL</i>
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	<i>NIHIL</i>
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	<i>NIHIL</i>
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	<i>NIHIL</i>
F. Bidang Urusan Sosial	<i>NIHIL</i>

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Geographic Information System	Menampilkan data-data perhubungan berupa Peta, Data dan Grafik
2	SIBANTER	Sistem Bantuan Non Tunai Kendaraan Bermotor

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Penilaian ketersediaan informasi publik pada website Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	Bupati Karanganyar
2	Penilaian Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	Bupati Karanganyar

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang disusun untuk mempersiapkan program-program kerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP.196902151990011002

DAFTAR ISI



Cover

Kata Pengantar----- i

Daftar Isi----- ii

Daftar Tabel----- iv

Daftar Gambar ----- v

BAB 1 P E N D A H U L U A N----- 1

 A. Latar Belakang ----- 1

 B. Dasar Hukum----- 1

 C. Maksud, Tujuan----- 4

BAB 2 DESKRIPSI UNIT KERJA ----- 5

 A. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan ----- 5

 1. Tugas Pokok----- 5

 2. Fungsi----- 5

 3. Struktur Organisasi----- 6

 B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan
 Oleh Skpd/Opd ----- 8

 C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SKPD/OPD -- 8

 D. PERDA/PERBUP Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
 Program Dan Kegiatan ----- 8

 E. Struktur Organisasi----- 10

 F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan ----- 10

**BAB 3 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH ----- 15**

 A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 15

 B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 15

**BAB 4 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ----- 18**

 A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar----- 18

B.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	25
C.	Pelaksanaan Urusan Pilihan-----	30
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan -----	30
BAB 5	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN-----	31
A.	Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten -----	31
B.	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten-----	31
C.	Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa-----	32
BAB 6	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL-----	33
A.	Bidang Urusan Pendidikan-----	33
B.	Bidang Urusan Kesehatan -----	33
C.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum-----	33
D.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat-----	33
E.	Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	33
F.	Bidang Urusan Sosial -----	33
BAB 7	INOVASI DAN PENGHARGAAN -----	34
A.	Inovasi dan Penghargaan -----	34
BAB 8	PENUTUP-----	35
A.	Kesimpulan-----	35
B.	Saran -----	35

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Daftar SOP Dinas Perhubungan-----	8
Tabel 2.2	Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan -----	8
Tabel 2.3	Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2023-----	11
Tabel 2.4	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi -----	14
Tabel 2.5	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi-----	14
Tabel 2.6	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)-----	14
Tabel 2.7	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)-----	15

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan-----	10
---	----